

|  |
| --- |
| **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )** |
| **KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG**  **TAHUN 2023** |

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 2023

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Salah satu untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita– cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Individu *(Key Performace Indicators)* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Individu *(Key Performace Indicators)* secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Dalam rangka memenuhi maksud tersebut diatas maka Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja individu dari instansi adalah hal individu apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core areal business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan individu instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja individu terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKI *(Key Performace Indicators)* adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKI digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai bentuk komitmen Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2023 disusun berdasarkan Keputusan Camat Ketapang Nomor : 188/ /KEP/434.512/2023 tentang *Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI)* Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

## Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Individu bagi instansi pemerintah

adalah

* + 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menajemen Kinerja secara baik
    2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

## Manfaat

Beberapa manfaat ditetapkan Indikator Kinerja Individu adalah :

* + 1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi
    2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKI instansi yang bersangkutan
    3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

# BAB II

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**

**KANTOR KECAMATAN KETAPANG**

**KABUPATEN SAMPANG**

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban adalah suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKI dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Sebelum menetapkan indikator kinerja, maka perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikit :

1. Relevan, indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian
3. Efektif dan layak, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikimpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidak-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari :

1. Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
2. Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu diperlukan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikimpulkan untuk suatu indikator
3. Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran , indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat
5. Dapat dikiantifikasi dan diukur, indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

## Dasar Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI)

Adapun hal – hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan indikator kinerja individu (IKI) Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikit :

* + 1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi
    2. Dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019- 2024
    3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 14 ) dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, maka perlu dipaparkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Ketapang
    4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## Indikator Kinerja Individu (IKI) Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

Menentukan Indikator Kinerja Individu suatu instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsesus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Langkah-langkah umum dalam penentuan IKI instansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja individu, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan/sasaran yang ingin di capai. Suatu indikator kinerja yang baik,

diawali dengan suatu pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang banyak.

1. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal IKI yang mungkin dapat digunakan, terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat digunakan dengan tepat.
2. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap IKI yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja, setelah berhasil membuat daftar awal IKI, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam daftar indikator kinerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja dalam daftar dengan kriterianya.
3. Tahap keempat, Memilih IKI, Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKI. Indikator- indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebututuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/sasaran.

Dalam pemilihan dan penetapan IKI bagi Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu IKI yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

IKI tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

* + - 1. Perencanaan Jangka Menengah
      2. Perencanaan *Tahunan*
      3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
      4. Laporan Akuntabilitas Kinerja
      5. Evaluasi Kinerja
      6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

# BAB III PENUTUP

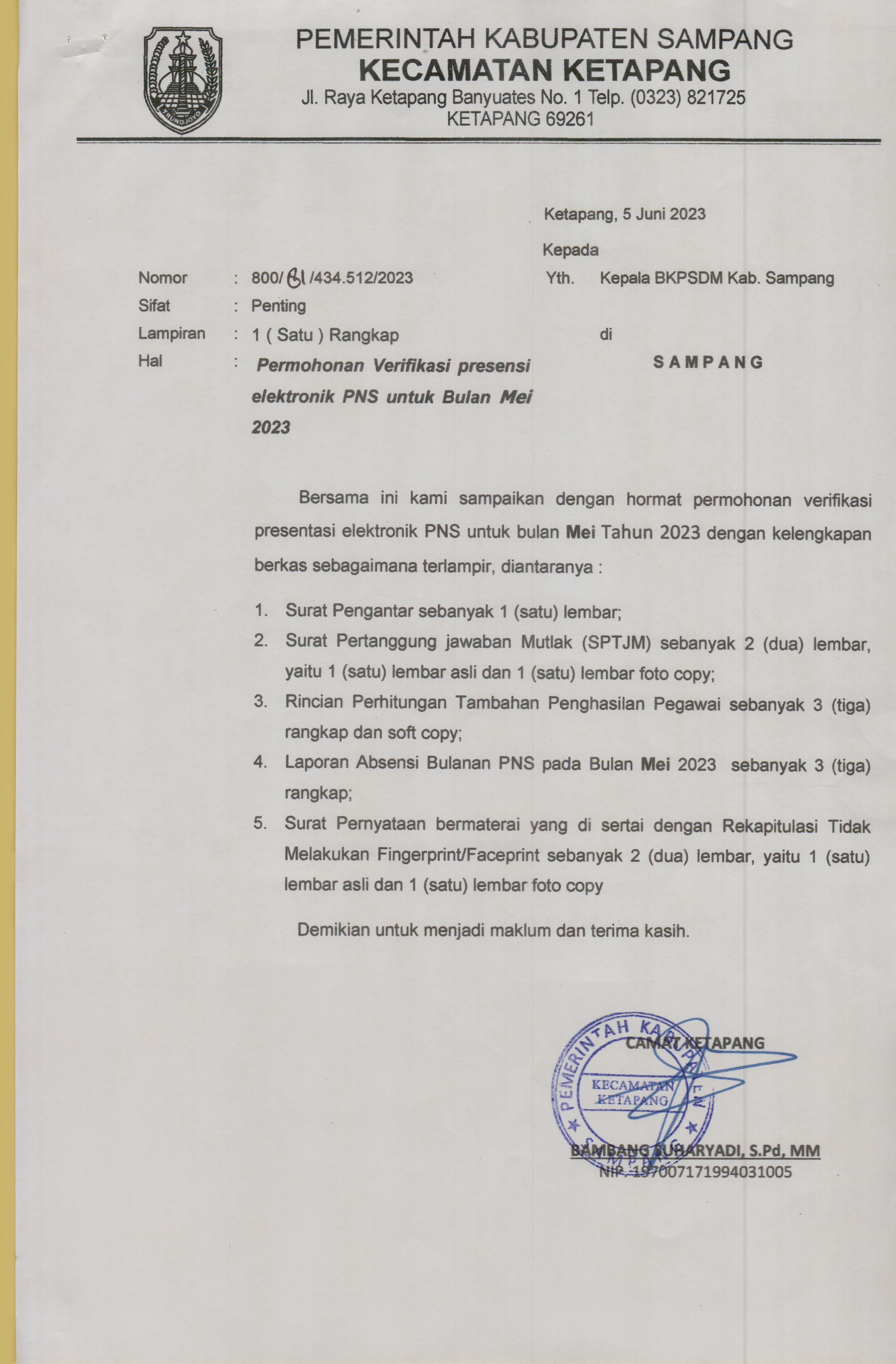
Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2023 merupakan komitmen Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*).

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun IKI sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKI dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Individu harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi ang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikialifikasi dan diukur.

Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja di lingkungan Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dalam melaksanakan misi guna mewujudkan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya



Sampang, Janiari 2023

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Sekretaris Kecamatan Ketapang
2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
   1. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan kecamatan;
   2. Pengelolaan urusan keuangan kecamatan;
   3. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan kecamatan;
   4. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga kecamatan;
   5. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
   6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas danfungsinya;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran/ Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Utama** | | **Penjelasan / Formulasi Penghitungan** | | **Sumber Data** |
| 1 | Meningkatkan kinerja pelayanan Peijinan dan administrasi Kependudukan | IKM | | (Total Nilai dari nilai persepsi per Unsur : Total Unsur yang terisi ) x nilai tertimbang | | Survei Kepuasan Masyarakat |
|  |  | Prosentase penyelesaian pelayanan bidang administrasi  kependudukan tepat waktu | | Jumlah KTP, KK dan Akta yang diproses tepat waktu Jumlah usulan pembuatann KTP, KK dan Akta | x 100 % | Laporan kependudukan |
|  |  | Prosentase  pelayanan waktu | penyelesaian pertanahan tepat | Jumlah Akta tanah yang diproses tepat waktu Jumlah usulan pembuatann Akta Tanah | x 100 % | Seksi Pemerintahan, Pelayanan Umum dan Informasi |
|  |  | Prosentase penyelesaian pelayanan perijinan teat waktu | | Jumlah IMB, HO, SIUP yang diproses tepat waktu Jumlah usulan pembuatann IMB, HO, SIUP | x 100 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Meningkatkan partisipasi dalam keamanan dalam keamanan dan keteritban  memadai | Angka Kriminalitas | (Jumlah kejadian kriminalitas – target jumlah kriminalitas ) | Polsek |
|  |  | Prosentase penyelesaian pengajuan SKCK dan ijin keramian tepat waktu | Jumlah SKCK Ijin keramaian yang diproses tepat waktu x 100 % Jumlah usulan pembuatann SKCK Ijin keramaian | Seksi Trantib |
| 3 | Meningkatkan Pengeloalaan Administrasi Desa | Prosentase desa yang tertib administrasi | Jumlah desa yang tertib administrasi x 100 % 20 desa | Administrasi desa |
|  |  | Prosentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban  kecamatan tepat waktu | Jumlah Dok pertanggungjawban yg seklsesai tepat waktu x 100 % Jumlah Dokumen pertanggungjawan yg haus ada | Bagian keuangan |
|  |  | Prosentase penyelesaian usulan anggaran desa tepat waktu | Jumlah Dok APBDes yang tepat waktu x 100 % 20 Desa | Seksi PMD dan Pemerintahan |
|  |  | Prosentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu | Jumlah Dok SPJ Desa yang tepat waktu x 100 % 20 Desa | Seksi PMD dan Pemerintahan |

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
   1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
   3. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
   4. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
   5. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
   6. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
   7. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas sertahubungan masyarakat;
   8. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
   9. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
   10. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
   11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran/ Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Utama** | **Penjelasan / Formulasi Penghitungan** | **Sumber Data** |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perijinan Dan Administrasi Kependudukan | Prosentase Penyelesaian Perencanaan Pembangunan tepat waktu | Jumlah Dok perencanaan yg seklsesai tepat waktu x 100 % Jumlah Dokumen perencanaan yg haus ada | RKA |
| Tersedianya arsip surat masuk dan keluar | Jumlah surat masuk dan keluar yang diarsip x 100 % Jumlah Dokumen surat masuk dan keluar dalam register | Register Surat masuk dan Keluar |
| Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Jumlah Sarana dan prasarana dalam kondisi baik x 100 % Jumlah Sarana dan prasaran yang dimiliki | Dokumen Inventaris Barang |
|  | | | |

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Keuangan dan Program, Mempunyai tugas :
   1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Program ;
   2. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
   3. Melaksanakan pengelolaan,pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
   4. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   5. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
   6. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang di ajukan pelaksana kegiatan; dan
   7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran/ Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Utama** | **Penjelasan / Formulasi Penghitungan** | **Sumber Data** |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perijinan Dan Administrasi Kependudukan | Prosentase Penyelesaian Perencanaan Pembangunan tepat waktu | Jumlah Dok perencanaan yg seklsesai tepat waktu x 100 % Jumlah Dokumen perencanaan yg harus ada | RKA |
| Prosentase Penyelesaian laporan pertanggungjawaban kecamatan tepat waktu | Jumlah Dok. Pertanggungjawaban yang selesai tepat waktu x 100 % Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang harus ada | SPM |
| Prosentase penyelesaian gaji pegawai tepat waktu | SP2D gaji yang dicairkan x 100 % Jumlah dokumen SPP-SPM gaji yang telah dibuat | SPP-SPM |

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Seksi Pemerintahan, Pelayanan Umum dan Informasi Kecamatan Ketapang
2. Seksi Pemerintahan, Mempunyai tugas :
   1. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan;
   2. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan intansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
   3. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa/Kelurahan;
   4. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   5. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
   6. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertahanan/keagrariaan;
   7. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsan; dan
   8. Menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum danadministrasi kepada masyarakat;
   9. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanankebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
   10. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanankekayaan dan inventarisasi wilayah;
   11. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginvestarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi,dan pengaduan;
   12. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjukteknis yang berkaitan dengan informasi; dan
   13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran/ Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Utama** | **Penjelasan / Formulasi Penghitungan** | **Sumber Data** |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perijinan Dan Administrasi Kependudukan | Prosentase Penyelesaian Pelayanan bidang Administrasi kependudukan tepat waktu | Jumlah KTP,KK dan Akta yang diproses tepat waktu x 100 %  Jumlah Usulan pembuatan KTP, KK dan Akta | Laporan Kependudukan |
| Prosentase Penyelesaian Pelayanan bidang Pertanahan tepat waktu | Jumlah Akta Tanah yang diproses tepat waktu x 100 % Jumlah Usulan pembuatan Akta Tanah | Register Pertanahan |
| Prosentase Penyelesaian Pelayanan bidang Administrasi kependudukan tepat waktu | Jumlah KTP,KK dan Akta yang diproses tepat waktu x 100 %  Jumlah Usulan pembuatan KTP, KK dan Akta | Laporan Kependudukan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meningkatnya Pengolahan dministrasi Desa | Prosentase Penyelesaian Usulan Anggaran Desa tepat waktu | Jumlah dokumen APBDes yang selesai tepat wakt x 100 % 20 Desa | APBDes |
|  |  | Prosentase Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban desa tepat waktu | Jumlah dokumen SPJ desa yang selesai tepat waktu x 100 % 20 desa | SPJ Desa |
|  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perijiinan dan Administrasi Kependudukan | IKM | (Total Nilai dari nilai persepsi per Unsur : Total Unsur yang terisi )  x nilai tertimbang | Survei Kepuasan Masyarakat |
|  |  | Prosentase Penyelesaian pelayanan perijinan tepat waktu | Jumlah IMB, HO, SIUP yang diproses tepat waktu  Jumlah usulan pembuatann IMB, HO, SIUP x 100 % | Register |

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ketapang
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Mempunyai tugas :
   1. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
   2. Melaksanakan koordinasi upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban;
   3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
   4. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
   5. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
   6. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
   7. Melaksakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
   8. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
   9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran/ Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Utama** | **Penjelasan / Formulasi Penghitungan** | **Sumber Data** |
| 1 | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam keamanan dan Ketertiban memadai | Angka Kriminalitas | Jumlah kejadian kriminalitas – Target Jumlah kriminalitas | Polsek Kec. Ketapang |
| Prosentase Penyelesaian Pengajuan SKCK dan Ijin Keramaian tepat waktu | Jumlah SKCK dan Ijin Keramaian yang diproses tepat waktu x 100 %  Jumlah Usulan pembuatan SKCK dan Ijin Keramaian | Register SKCK dan Register Ijin Keramaian |

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ketapang
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Mempunyai tugas :
   1. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
   2. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
   3. Menyusun program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
   4. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
   5. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
   6. Menyusun program dan pembinaan dalam peningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
   7. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah desa/kelurahan;
   8. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
   9. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejateraan Rakyat;
   10. Menyusun program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
   11. Menyusun program dan pembinaan dibidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
   12. Menyusun program dan pembinaan dibidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
   13. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
   14. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   15. Melaksanakan investarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejateraan masyarakat;
   16. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial;
   17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran/ Kinerja Utama** | **Indikator Kinerja Utama** | **Penjelasan / Formulasi Penghitungan** | **Sumber Data** |
| 1 | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam  Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan | Prosentase Penyelesaian Perencanaan Pembangunan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu x 100 %n Jumlah Dokumen perencanaan yang harus ada | Musrenbangdes |
| Prosentase Penyelesaian usulan anggaran desa tepat waktu | Jumlah Dokumen APBDes yang selesai tepat waktu x 100 % 20 desa | APBDes |
|  |  | Prosentase penyelesaian laporan pertanggungjawaban desa tepat waktu | Jumlah Dokumen SPJ desa yang selesai tepat waktu x 100 % 20 desa | SPJ Desa |
|  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perijiinan dan Administrasi  Kependudukan | Prosentase Penyelesaian Buku Keejahteraan Sosial | Jumlah buku register yang selesai dg baik tepat waktu x 100 %n Jumlah buku register kesos yang harus ada | Buku register kesos |
|  |  | Prosentase Penyelesaian pelaksanaan distribusi raskin | Jumlah raskin yang distribusi tepat waktu x 100 % Jumlah total raskin yang diterima | Laporan distribusi |
|  |  | Prosentase fasilitasi pelaksanaan perpustakaan keliling | Jumlah kegiatan perpustakan keliling yang tepat waktu x 100 % Jumlah kegiatan perpustakaa keliling sesuai jadwal | Jadwal perpustakan keliling |
|  |  |  |  |  |